

RINGKASAN

Inez Diva Ashilvania, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, MAKNA HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN KUASA ASUH (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), Rachmi Sulistyarini S.H., M.H, Fitri Hidayat S.H., M.H

Pada Penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Makna Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dan Kuasa Asuh (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Penelitian ini dilatar belakangi adanya dua istilah yang mengaburkan makna tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kuasa Asuh dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 *juncto* Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekaburan makna dalam norma ini dapat diketahui dari isi kedua Undang – Undang tersebut yang menyatakan bahwa Undang – Undang Perkawinan menyebutkan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya, sedangkan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak menyebutkan tentang kuasa asuh yang didalam kedua Undang – Undang ini terdapat perbedaan yang menyebabkan permasalahan.

Kemudian skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan perbandingan. Berdasarkan hasil dari penelitian dengan metode tersebut penulis memperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu kekuasaan orang tua terhadap anak dan kuasa asuh memiliki makna yang berbeda dimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam undang – undang perkawinan mengarah pada kekuasaan orang tua terhadap anak hingga mereka dewasa, sedangkan kuasa asuh dalam undang - undang perlindungan anak mengarah kepada bagaimana kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak beserta konsekuensi yang akan diterima.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dapat dilihat permasalahan dalam proses pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dan kuasa asuh anak, bahwa proses pencabutan dalam Undang-undang perkawinan dengan menggunakan putusan pengadilan, sedangkan dalam undang – undang perlindungan anak menggunakan penetapan pengadilan

SUMMARY

Inez Diva Ashilvania, *Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in September 2016, DEFINITION OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARENTS OF CHILDREN AND FOSTER AUTHORIZATION (Comparative of Law Number 1 of 1974 on Marriage with Law number 23 of 2002 in conjunction with Law number 35 of 2014 on Protection of Children)*, Rachmi Sulistyarini SH, MH, Fitri Hidayat, SH, MH

In this thesis, the author lifts "The Definition of Rights and Responsibilities of Parents toward Their Children and Foster Authorization (Comparative Study Law number 1 year 1974 about Marriage and Law number 23 year 2002 in conjunction with Law number 35 year 2014 about Children Protection).

The background case of this from research is two terms which obscure definition of Rights and Responsibilities of parents toward their children on Law number 1 year 1974 about marriage with Authorization Foster on Law number 23 year 2002 in conjunction with Law number 35 year 2014 about children protection. This obscure definition on this norm could be indicated by the second content of the Law which says that Law of Marriage was about the authorization of parents toward their children, in other hand the Law of Children Protection says about the authorization of parenting, that condition makes a difference between these two Laws which cause a problem.

This normative juridic research uses statute approach and comparative approach. Based on the results of studies with these methods the authors obtained the answer to the problems in this research that the power of parents to children and foster authorization have a different meaning in which the rights and responsibilities of parents to children in law of marriage led to the power of parents to children until they are adults, whereas the foster authorization in law of Child protection legislation leads to how the duties and responsibilities of parents towards children and their consequences will be accepted.

Based on the comparison conducted by the author in this study can be seen problems in the process of revocation of parent to child and foster authority, that the revocation process in the Act of marriage by using the court decision, whereas in the Act of children protection legislation using the court volunteer decision